

**ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Wira Hendri<sup>1</sup> Mashur<sup>2</sup> Mawardi<sup>3</sup>**  
**Universitas Gunung Rinjani**  
wirahendri@gmail.com

**ABSTRAK**

Isu kesejahteraan masyarakat telah menjadi topik menarik dalam berbagai literatur penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Hasil akhir dari berbagai peneliti sebelumnya belum menunjukkan konsistensi arah hubungan antar variabel. Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi NTB. Variabel penelitian yang digunakan kinerja ekonomi yang diukur menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, penyerapan tenaga kerja, penduduk diatas garis kemiskinan, pembentukan modal tetap bruto perkapita dan PDRB perkapita. Sedangkan variabel kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan indeks kriminalitas daerah. Data penelitian menggunakan data Panel yang terdiri dari gabungan 10 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu selama periode tahun 2008 – 2017 yang diperoleh dari departemen keuangan, badan pusat statistik provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model PLS. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

**1.1 Latar Belakang**

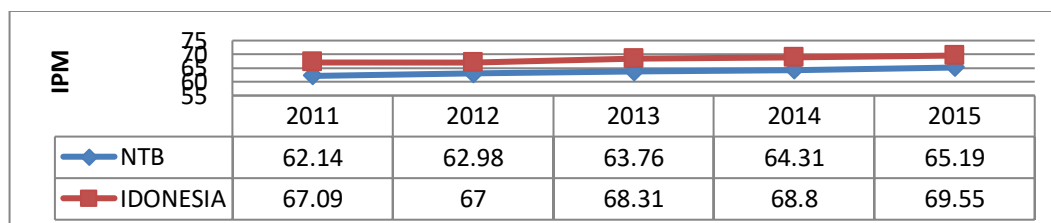
Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera dapat diartikan sebagai kecukupan sandang, pangan dan papan. Pembangunan tidak akan pernah berhenti pada waktu tertentu. Berdasar pada realitas, bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat terjadi silih berganti, dan tidak pernah selesai, bahkan cenderung semakin kompleks. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan secara terus menerus secara berkesinambungan dari fase ke fase, dan bahkan dari rezim ke rezim, sebagaimana roda berjalan. Di dalam prinsip administrasi pembangunan, tercapainya tujuan pembangunan pada kurun waktu tertentu, menjadi awal dari pembangunan berikutnya, dan begitu seterusnya. Pada praktiknya, pembangunan di Indonesia dibagi ke dalam sektor-sektor yang masing-masing sektor menjadi tugas dan wewenang kementerian dan atau lembaga negara. Sektor-sektor tersebut merupakan bagian atau subsistem dari sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, satu sektor dengan sektor lain saling mempengaruhi dan menentukan capaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini berarti, bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan kesejahteraan sosial, akan membawa implikasi terhadap capaian tujuan pembangunan nasional, dan begitu sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka kegagalan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak semata-mata kegagalan Presiden, akan tetapi juga kegagalan pimpinan di kementerian dan atau lembaga negara lain.

Paradigma pembangunan daerah di era otonomi daerah seharusnya mengacu pada tujuan dasar yaitu bahwa daerah di beri kewenangan untuk merencanakan pembangunan

daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu esesnsi otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan potensi daerah dengan meningkatkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun didaerahnya masing-masing. Selain itu dalam era otonomi daerah, hal hal yang berhubungan dengan masalah kebijakan, perencanaan, pengawasan, maupun pembiayaan kegiatan menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah daerah. Sehingga salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan menentukan bagi suatu daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri yaitu dengan mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial didaerah yang bersangkutan.

Peningkatan kemakmuran masyarakat daerah sangat membutuhkan dukungan baik moril maupun materiil dari pemerintah daerah sebagai motor penggerak pembangunan. Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki daerah. Sehingga pembangunan ekonomi daerah juga merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan guna dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi daerah yang bersangkutan (Azis, 1994).

Di Provinsi NTB Misalnya, sebagai salah satu provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat NTB dapat diketahui dari angka IPM yang digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih berada di bawah angka IPM di Indonesia (Gambar 1.1). Pada gambar 1.1 IPM NTB mencapai 65,15 persen lebih rendah dibandingkan dengan IPM Indonesia yang mencapai 69,55 persen pada tahun 2015. Rendahnya angka IPM di NTB mendorong naiknya angka kriminalitas daerah (IKD). Angka IKD yang tinggi terdapat pada Kabupaten Sumbawa dengan 1.723 kasus, Bima 1.287 kasus, Sumbawa Barat dengan 1.189 kasus, Lombok Barat dengan 1.135 kasus, Kota Kota Mataram dengan 1.091 kasus, Lombok Timur 925 Kasus, Lombok Tengah dengan 920 kasus, Kota Bima dengan 515 kasus dan Lombok Utara dengan 252 kasus (BPS, 2016).Fakta ini mengindikasikan program pembangunan di daerah ini kurang mampu berperan sebagai faktor pendorong dan justru cenderung 'ditarik' oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber :BPS, 2016 (Diolah)

**Gambar 1.1 Perkembangan IPM Indonesia dan NTB Tahun 2011-2015**

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa IPM Provinsi NTB lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Walaupun terjadi perbaikan kinerja atau percepatan peningkatan IPM dalam 3 tahun terakhir tetapi laju peningkatannya tidak jauh berbeda dengan laju peningkatan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat NTB masih rendah. Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi

adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2015, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi diantara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia dan menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta. Sementara, IPM NTB berada pada urutan ke lima terendah dari 33 provinsi setelah Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat dan Sulawesi barat (BPS, 2016).

Mencermati fakta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat NTB. Maka, menurut peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di NTB antara lain berasal dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi seperti pelaksanaan desentralisasi fiskal yang kurang maksimal, kinerja keuangan yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak mencapai target yang diinginkan sehingga mengganggu kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan dan faktor non ekonomi seperti kualitas kelembagaan daerah yang kurang berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Faktor non ekonomi tidak menjadi fokus analisis peneliti karena beberapa pertimbangan seperti pembatasan variabel penelitian yang hanya berfokus pada analisis faktor ekonomi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses data sekunder dan keterbatasan waktu penelitian.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.1.1 Pengertian kesejahteraan masyarakat**

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

#### **2.1.2 Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Secara umum, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach* (Sudarsono, 1982). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep di mana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda, misalnya, seseorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih produk A daripada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih produk A daripada produk B. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Menurut Sudarsono (1982), fungsi kesejahteraan masyarakat dirumuskan secara umum sebagai berikut:

$$W = f(U^A, U^B) \dots\dots\dots (2.1)$$

yang menunjukkan bahwa  $U^A$  dan  $U^B$  adalah daya guna (manfaat atau *utility*) golongan masyarakat A dan B sebagai fungsi daya guna individu. Nilai *Wealth* ( $W$ ) akan meningkat apabila salah satu daya guna  $U^A$  atau  $U^B$  meningkat tanpa menurunkan daya guna orang lain. Fungsi ini menggambarkan perbandingan fungsi kesejahteraan antarindividu yang sebelumnya tidak dapat ditentukan.

### **2.1.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Arsyad (2004) dan Sukirno (2006), tingkat pendapatan per-kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita dan kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Kelemahan pertama meliputi kelemahan metodologis dan statistis dalam penghitungan pendapatan per-kapita dengan nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Telah terjadi penafsiran yang salah/terlalu rendah terhadap negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan tersebar di berbagai pelosok sehingga tidak dimasukkan dalam variabel perhitungan pendapatan nasional dan nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan valuta asing tidak mencerminkan perbandingan harga kedua negara, walaupun dalam teori dikatakan nilai tukar menyatakan harga. Kelemahan kedua meliputi pengabaian faktor-faktor lain selain tingkat pendapatan, seperti faktor ekonomi, yaitu struktur umur penduduk, distribusi pendapatan timpang, corak pengeluaran masyarakat berbeda, dan faktor non ekonomi, yaitu adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat.

Untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut, Nordhaus dan Tobin mengenalkan *Net Economic Welfare* (NEW) dalam penghitungan pendapatan nasional (Arsyad, 2004). Indikator NEW menyempurnakan nilai PDB sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agar diperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah menambahkan pemanfaatan waktu senggang dan perekonomian sektor informal dalam penghitungan PDB. Koreksi negatif adalah mengurangi biaya kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan pembangunan dalam penghitungan PDB.

IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak. Dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan lamanya sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta dimensi standar hidup yang layak yang diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang

disesuaikan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas hidup. Formula penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [ X1 + X2 + X3 ] \dots\dots\dots (2.2)$$

yang menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 masing-masing adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks tingkat kehidupan yang layak (BPS, 2009d:8).

Menurut BPS (2009), secara konseptual angka harapan hidup (AHH) diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Hal ini sebagai bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berkaitan dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis secara langsung dapat memperpanjang usia hidup seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk.

AHH digunakan sebagai dasar untuk menghitung indeks kesehatan yang dianggap dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan masyarakat telah menggunakan sumber daya masyarakat untuk memajukan kesehatan. Oleh karena itu, ditetapkan angka minimal dan maksimal dalam AHH. Berdasarkan standar UNDP, angka minimal dalam AHH ditetapkan sebesar 25 tahun, artinya seseorang diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 25 tahun meskipun dengan fasilitas kesehatan yang minimal. Berdasarkan standar UNDP, angka maksimal dalam AHH ditetapkan sebesar 85 tahun, artinya umur 85 tahun merupakan umur tertinggi bagi seseorang yang masih mempunyai makna dalam menikmati sisa hidupnya.

Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis. Tingkat melek huruf dihitung dari persentase populasi orang dewasa yang dapat menulis dan membaca. Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangannya, melek huruf diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar, dan menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan dan menjadi ukuran standar yang dapat dibandingkan antarwilayah atau antarnegara.

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Secara yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Secara kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum atau perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau

melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut BPS (2006), jenis kejahatan adalah perampokan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pengrusakan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, kebakaran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu, pengeroyokan, dan narkotik.

Selain IPM dan IKD, indikator lain yang digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per-kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

## **2.2 Kinerja Ekonomi Daerah**

Kinerja Ekonomi diartikan sebagai gambaran bagus tidaknya perekonomian suatu daerah. Variabel-variabel yang dapat memperlihatkannya adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, pengangguran, tenaga kerja dan kependudukan, (Kuncoro, 2013). Sukirno (2008) juga menjelaskan bahwa, ada beberapa indikator ekonomi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja ekonomi yaitu, 1) pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, 2). Tingkat pengangguran, 3). tingkat inflasi, 4). kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, 5). kestabilan nilai uang domestik. dalam penelitian ini indikator kinerja ekonomi yang digunakan merujuk pada pendekatan indikator ekonomi dari Kuncoro (2013) dan Sukirno (2007) meliputi Pertumbuhan Ekonomi, inflasi dan pengangguran.

Studi penelitian tentang kinerja ekonomi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya Isnowati (2012) menunjukkan bahwa investasi swasta memberikan pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, investasi pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah signifikan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tenaga kerja memberikan pengaruh yang positif baik dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk variabel keterbukaan ekonomi nilai koefisien regresi pendek dan jangka panjang adalah positif dan signifikan.

Indriani (2011) menunjukkan adanya hubungan yang positif pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran investasi pemerintah

mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi  $1\%/2,5\% = 0,4\%$ . Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata.

Landiyanto (2005), melakukan penelitian pada Pemerintahan Kota Surabaya (Pemkod Surabaya) menyimpulkan bahwa pemerintah kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan PAD kota Surabaya. Pemkot Surabaya perlu meningkatkan penerimaan dari sumber daya daerah ( pajak dan retribusi) serta optimalisasi kinerja BUMD. Selain itu juga perlu diberi keleluasaan dalam melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. Ketergantungan finansial pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Setu Setyawan ketika mengukur kinerja Anggaran pemerintah kota Malang.

## **2.3 Indikator Kinerja Ekonomi**

### **2.3.1 Pertumbuhan ekonomi wilayah**

Pertumbuhan ekonomi secara teoritis dapat didefinisikan sebagai penjelasan dari faktor-faktor apa saja yang menentukan output perkapita dalam jangka panjang, serta penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Terdapat perbedaan istilah antara perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter dan Hick dalam Jhingan (2003). Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan peningkatan jumlah penduduk. Hick mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum digunakan. selanjutnya menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, Kabupaten/Kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.3)$$

Di mana:

- PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- $PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu
- $PDRB_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

### **2.3.2 Inflasi**

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 1994). Dalam perekonomian seringkali besarnya tingkat inflasi berkisar antara 2 sampai 4 persen per-tahun, inflasi ini tergolong inflasi dalam inflasi merayap. Sering kali inflasi yang terjadi lebih serius, yang besarnya antara 5 hingga 10 persen pertahun. Dalam keadaan tertentu, inflasi juga dapat mencapai ratusan bahkan ribuan persen pertahun sebagai akibat resesi ekonomi atau sebab-sebab lain, inflasi ini tergolong dalam inflasi hiper.

### 2.3.3 Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994).

## 4. METODE PENELITIAN

### 4.1 Variabel Penelitian

Tabel 4.1 Obyek Penelitian Berdasarkan Variabel Penelitian

NO	NAMA VARIABEL	NOTASI	INDIKATOR
3.	Kinerja Ekonomi (X <sub>1</sub> )	KE1	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		KE2	Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		KE3	Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		KE4	Penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
		KE5	Pembentukan Modal Tetap Bruto Per-kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		KE6	PDRB per-kapita kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat
5	Kesejahteraan Masyarakat (Y <sub>1</sub> )	KM1	Angka Harapan Hidup
		KM2	Harapan Lama Sekolah
		KM3	Rata-rata Lama Sekolah
		KM4	Pengeluaran Perkapita
		KM5	Indeks Kriminalitas Daerah

### 4.5 Jenis Dan Sumber Data

#### 4.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang di ukur dalam suatu skala numerik (angka). Contohnya dalam penelitian ini adalah data Panel. Data panel yaitu gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*.

#### 4.5.2 Sumber Data



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder. Contohnya Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang digunakan dalam penelitian bersumber dari publikasi dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dan juga diperoleh melalui akses internet pada alamat website/situs resmi <http://www.bps.go.id>.

#### 4.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Menurut Sugiyanto (2009) analisis *Partial Least Square (PLS)* adalah teknik statistika *multivariate* yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang di desain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi masalah spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas. PLS merupakan alat yang andal untuk menguji model prediksi yaitu tidak berdasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada data yang mengalami penyakit asumsi klasik (seperti data tidak berdistribusi normal, masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi), dapat digunakan untuk ukuran sampel kecil dan dapat digunakan untuk konstruk formatif dan reflektif.

##### 4.6.1 Model SEM Yang Digunakan

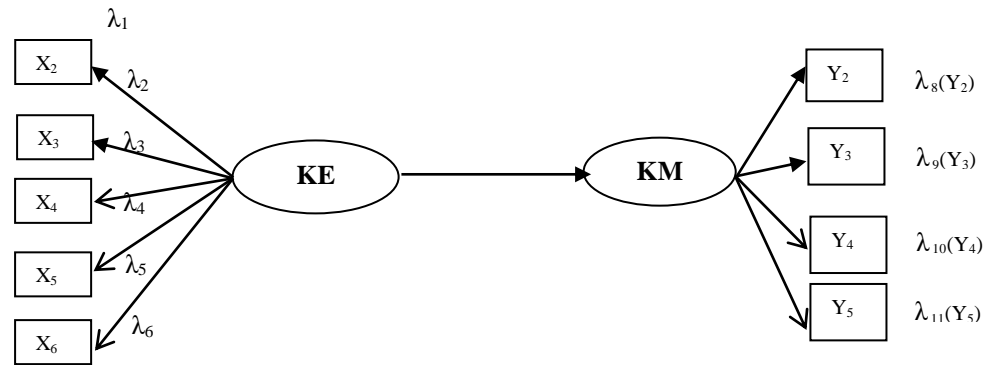
Model SEM sebagai teknik analisis dibedakan atas dua yaitu SEM berbasis kovarian dan SEM berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian diwakili oleh piranti lunak AMOS, Lisrel dan EQS. SEM yang berbasis kovarian ini asumsinya sangat ketat, diantaranya adalah: 1) datanya harus berdistribusi normal secara multivariat, 2) model indikator harus reflektif, 3) skala pengukuran variabel harus kontinu (sinambung), 4) ukuran sampel harus besar. Sedangkan SEM yang berbasis varian diwakili oleh piranti lunak PLS (*smartPLS*, *PLS Graph*, *VisualPLS* dan *PLSGUI*). Model SEM yang berbasis varian ini mengabaikan asumsi yang berlaku pada model SEM yang berbasis kovarian. Dengan kata lain bahwa model SEM yang berbasis varian, distribusi data tidak menjadi masalah, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval dan rasio. ukuran sampel tidak harus besar, dan model pengukuran indikator dapat untuk reflektif atau formatif (Gozali, 2011).

Secara mendasar, perbedaan SEM yang berbasis kovarian dengan SEM yang berbasis varian PLS adalah pada SEM berbasis kovarian, model yang dianalisis harus dikembangkan berdasarkan teori yang kuat dan tujuannya adalah mengkonfirmasi model ini dengan data empirisnya. Sedangkan pada SEM yang berbasis varian lebih menekankan pada model prediksi sehingga dukungan teori yang kuat tidak begitu menjadi hal penting. Untuk berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis SEM berbasis varian, yaitu SEM dengan piranti lunak *SmartPLS* versi 3.0 M3.

##### 2.7.2 Inner Model

Dalam PLS inner model juga disebut *inner relation* yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori Gambar 4.2





Keterangan Gambar :

1. Variabel Laten Eksogen  
 KE = Kinerja Ekonomi
  
2. Variabel Manifest Eksogen  
 $X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di NTB  
 $X_2$  = Inflasi kabupaten/Kota di NTB  
 $X_3$  = Penyerapan Tenaga Kerja kabupaten/Kota di NTB  
 $X_4$  = Penduduk di atas Garis Kemiskinan Pembentukan Modal Tetap Bruto kabupaten/Kota di NTB  
 $X_5$  = Pembentukan Modal Tetap Bruto kabupaten/Kota di NTB  
 $X_6$  = PDRB per-kapita Kabupaten/Kota di NTB
  
3. Variabel Laten Endogen  
 KM = Kesejahteraan Masyarakat
  
4. Variabel Manifest Endogen  
 $Y_1$  = Angka Harapan Hidup  
 $Y_2$  = Harapan Lama Sekolah  
 $Y_3$  = Rata-rata Lama Sekolah  
 $Y_4$  = Pengeluaran Perkapita  
 $Y_5$  = Indeks Kriminalitas Daerah
  
5. Semua variabel laten endogen diberi nilai *residual regression* dengan lambang  $\epsilon$ .
6. Hubungan antar 2 variabel endogen dilambangkan dengan  $\beta$ .
7. Model pengukuran untuk X  
 Outer Kinerja Ekonomi (Variabel laten eksogen  $\xi_1$ ) terdiri dari 3 indikator dengan kontruk kedalam persamaan:

$$X_1 = \xi_1 KE + \epsilon_1 \dots\dots\dots(4.1)$$

$$X_2 = \xi_2 KE + \epsilon_2 \dots\dots\dots(4.2)$$

$$X_3 = \xi_3 KE + \epsilon_3 \dots\dots\dots(4.3)$$

$$X_4 = \xi_4 KE + \epsilon_4 \dots\dots\dots(4.4)$$

$$X_5 = \xi_5 KE + \epsilon_5 \dots\dots\dots(4.5)$$

$$X_6 = \xi_6 KE + \epsilon_6 \dots\dots\dots(4.6)$$

Keterangan:

- X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di NTB
- X<sub>2</sub> = Inflasi Kabupaten/Kota di NTB
- X<sub>3</sub> = Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di NTB
- X<sub>4</sub> = Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di NTB
- X<sub>5</sub> = Pembentukan Modal tetap Bruto Perkapita Kabupaten/Kota di NTB
- X<sub>6</sub> = PDRB Perkapita

8. Model pengukuran untuk Y

Outer Kesejahteraan Masyarakat (Variabel laten endogen ) terdiri dari 3 indikator dengan kontruk kedalam persamaan:

$$Y_1 = \lambda_1 KM + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (4.7)$$

$$Y_2 = \lambda_2 KM + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (4.8)$$

$$Y_3 = \lambda_3 KM + \varepsilon_3 \dots \dots \dots (4.9)$$

$$Y_4 = \lambda_4 KM + \varepsilon_4 \dots \dots \dots (4.10)$$

$$Y_5 = \lambda_5 KM + \varepsilon_5 \dots \dots \dots (4.11)$$

Keterangan:

- Y<sub>1</sub> = Angka Harapan Hidup
- Y<sub>2</sub> = Harapan Lama Sekolah
- Y<sub>3</sub> = Rata-rata Lama Sekolah
- Y<sub>4</sub> = Pengeluaran Perkapita
- Y<sub>5</sub> = Indeks Kriminalitas

Model persamaan struktural adalah hubungan antar variabel laten yang dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini:

$$KM = \gamma + \beta_1 KE + \varepsilon_3 \dots \dots \dots (4.12)$$

Dimana :

- KE = Kinerja Ekonomi
- KM = Kesejahteraan Masyarakat
- β<sub>1</sub> = koefisien regresi
- ε<sub>i</sub> = kesalahan pengganggu

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) *Convergen Validity (CV)* pada indikator reflektif yaitu dengan melihat korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya. Nilai yang ditoleransi minimal 0,50 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali 2011).
- 2) *Discriminant Validity (DV)* pada indikator reflektif yaitu dengan melihat cross loading terhadap kontruk atau latennya. DV yang bagus yang mana indikatornya memiliki *cross loading* lebih pada kontruknya dibandingkan terhadap kontruk lainnya. Metode lain untuk melihat *diskriminant validity(DV)* adalah dengan melihat *square root of average variance extrcted (AVE)* setiap kontruk dengan korelasi antara kontruk dengan kontruk lainnya dalam model. Jika nilai kuadrat AVE setiap kontruk dengan korelasi antara kontruk dengan kontruk lainnya dalam model, maka kontruk yang bersangkutan dikatakan memiliki *discriminant validity (DV)* yang baik. Direkomendasi bahwa nilai AVE yang lebih besar dari 0,50. Formula menghitung AVE adalah sebagai berikut:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum Var(\varepsilon)} \dots \dots \dots (4.13)$$

Keterangan:

λ<sub>i</sub> = Loading Factor ke Indikator; Var (ε) = 1 - λ<sub>i</sub><sup>2</sup>

3) *Composite Reliability* ( $\rho_c$ ) umumnya digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, disamping *Cronbach Alpha* yang sering digunakan. Dengan output PLS maka *Composite reliability* dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum var(\epsilon)} \dots\dots\dots(4.14)$$

keterangan:

$$\lambda_i = \text{Loading Factor ke Indikator}; \text{Var}(\epsilon) = 1 - \lambda_i^2$$

**4.8 Evaluasi Goodness of Fit**

Evaluasi *Goodness of fit* terhadap inner model dilakukan dengan memperhatikan  $R^2$  untuk variabel laten dependen. Nilai  $R^2$  sekitar 0,67 dikatakan baik. 0,33 dikatakan moderat, sedangkan 0,19 dikatakan lemah. Perubahan  $R^2$  dapat digunakan untuk menilai variabel laten tertentu terhadap variabel laten independen apakah memiliki pengaruh yang substantif.

Selain  $R^2$ , model PLS juga dapat dievaluasi kemampuan prediksinya atau *predictive prevelance* melalui *Stone-Geiser Q Square test* (Ghozali, 2011), dengan formula:

$$Q^2 = 1 - \frac{\sum D E_D}{\sum D O_D} \dots\dots\dots(4.14)$$

Keterangan:

D = *Omission Distance*

E = Jumlah Kuadrat Prediksi

O = Jumlah Kuadrat Observasi

Nilai  $Q^2$  juga dapat diperoleh dengan formula:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots\dots\dots(4.15)$$

Nilai  $Q^2$  di atas nol memberikan makna bahwa model yang dibuat memiliki *predictive prevelance*, sebaliknya nilai  $Q^2$  di bawah nol memberikan makna bahwa model yang dibuat kurang memiliki *predictive prevelance*.

**4.9 Pengujian Hipotesis**

Pengujian statistik dilakukan dengan memperhatikan nilai uji t statistiknya yang diperoleh dengan metode bootstrapping. Hasil dari bootstrapping akan menghasilkan beberapa nilai statistik, antara lain:

- 1) *path coefficient* akan memberikan jawaban mengenai pengaruh langsung (*direct effect*) antar variabel penelitian yaitu hipotesis no 1 sampai hipotesis 4.
- 2) *indirect effect* dihasilkan oleh program PLS secara otomatis. Koefisien ini juga disebut pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel endogen setelah melalui proses mediator, yaitu untuk menjawab hipotesis 5 sampai 9.

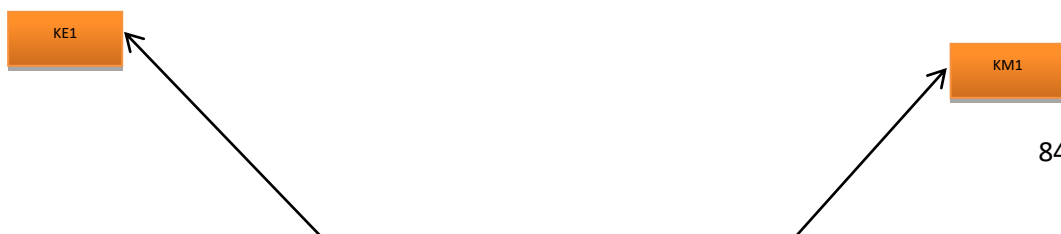
**4.10 Interpretasi**

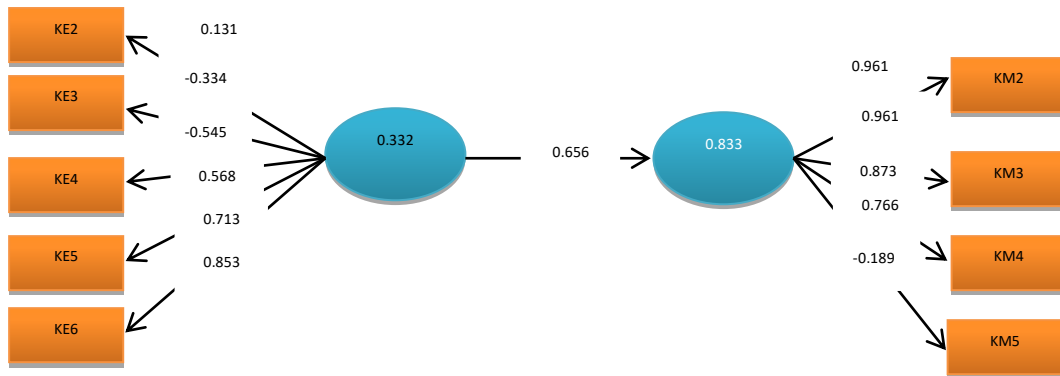
Hasil olah data akan diinterpretasikan dengan konsep yang mendasarinya serta studi empiris sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pembentukan konstruk (*outer model*), maupun hubungan antar konstruk (*inner model*).

**5. HASIL ANALISIS**

**5.1 Analisis Model Struktural**

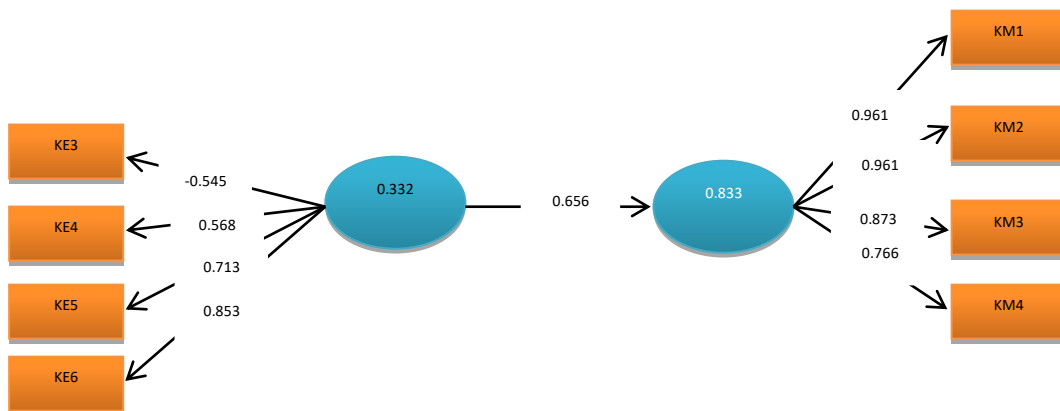
Secara keseluruhan, model Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada Gambar 5.1.





Gambar 5.1  
Model Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi  
Nusa Tenggara Barat  
Sumber: Lampiran

Berdasarkan estimasi model pertama ditemukan variabel kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki loading faktor kurang dari 0,5 seperti pertumbuhan ekonomi (KE1); inflasi(KE2); dan indeks kriminalitas daerah (KM5) dikeluarkan dari model. Oleh karena masing-masing indikator yang dikeluarkan tidak memiliki keterkaitan dengan indikator lainnya dan memiliki tanda arah yang reflektif, maka dapat dipastikan indikator yang dikeluarkan tidak mempengaruhi kedudukan variabel tersebut.



Gambar 5.3  
Full Model Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Sumber: Lampiran

### 5.3.1 Uji Outer Model

Evaluasi model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *Convergent Validity*, dan *discriminant validity* untuk blok indikator.

#### 1) *Convergent Validity*

*Convergent validity* dapat dilihat dari nilai *outer loading* antar variabel terukur dan konstraknya. Nilai *outer loading* yang ditoleransi adalah 0,50 apabila kurang dari 0,50 dapat dipertimbangkan jika nilai t hitung tidak kurang dari 1,96 (atau signifikan pada  $\alpha = 5\%$ ). Nilai *outer loading* disajikan pada Tabel 5.25.

Tabel 5.1 *Outer Loading* Indikator Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Masing-masing Konstruknya

Hubungan Antar Variabel			Original Sample (O)	Standar Error (STERR)	T Statistics (IO/STERRI)
KE 3	←	Kinerja Ekonomi	-0,568	0,081	7,025
KE 4	←	Kinerja Ekonomi	0,547	0,109	5,027
KE 5	←	Kinerja Ekonomi	0,740	0,048	15564
KE 6	←	Kinerja Ekonomi	0,861	0,022	39,258
KM1	←	Kesejahteraan Masyarakat	0,960	0,008	113,075
KM2	←	Kesejahteraan Masyarakat	0,964	0,007	137,039
KM3	←	Kesejahteraan Masyarakat	0,880	0,016	55,527
KM4	←	Kesejahteraan Masyarakat	0,763	0,055	13,982

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa hampir semua indikator yang membentuk konstruk eksogen (reflektif), yaitu: Kinerja Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai *outer loading* diatas 0,50 dan secara statistik adalah signifikan dengan nilai t-hitung lebih besar dari 1,96. Hal ini berarti terpenuhi syarat *convergent validity*, kecuali untuk indikator KE3 (Penyerapan Tenaga Kerja) terhadap konstruk Kinerja Ekonomi.

Indikator tersebut memiliki nilai *outer loading* lebih kecil dari 0,50 dan nilai t-hitung lebih kecil dari 1,96, sebagai tindak lanjut hal tersebut maka KE3 harus di drop.

## 2) *Discriminant Validity*

Model baru setelah dikeluarkan indikator KE3 dapat diuji *discriminant validity* dengan melihat nilai *cross loading*. Nilai korelasi indikator dengan konstraknya harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk lainnya. Berikut ditampilkan nilai *cross loading* indikator dengan konstraknya pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* setiap indikator lebih tinggi pada konstraknya dibandingkan terhadap konstruk lainnya. kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat melalui nilai *Composite Reliability* (CR), *Cronbachs Alphan* dan *Average Variance Extracted* (AVE) yang pada umumnya digunakan untuk indikator reflektif, bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbachs Alpha* disajikan pada Tabel 5.30 dan Nilai AVE disajikan pada Tabel 5.27.

Berdasarkan Tabel 5.3 variabel yang mempunyai nilai realibilitas komposit yang memenuhi ketentuan adalah Variabel Kinerja Ekonomi memiliki nilai *Composite Reliability* < 0,7 dan *Cronbachs Alpha* < 0,6 sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai batas yang dapat diterima.

Tabel 5.2 *Cross Loading* Indikator Kinerja Ekonomidan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Masing-Masing Konstruknya

Konstruk	Indikator	KE	KM
----------	-----------	----	----

Kinerja Ekonomi	KE4	<b>0,547</b>	0,500
	KE5	<b>0,740</b>	0,558
	KE6	<b>0,861</b>	0,757
Kesejahteraan Masyarakat	KM1	0,795	<b>0,960</b>
	KM2	0,811	<b>0,964</b>
	KM3	0,773	<b>0,880</b>
	KM4	0,662	<b>0,763</b>

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 5.2 variabel yang mempunyai nilai realibilitas komposit yang memenuhi ketentuan adalah variabel Variabel Kinerja Ekonomi memiliki nilai *Composite Reliability* < 0,7 dan *Cronbachs Alpha* < 0,6 sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai batas yang dapat diterima.

Tabel 5.3 *Composite Reliability dan Cronbachs Alpha* Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>
Kinerja Ekonomi	0,544	0,087
Kesejahteraan Masyarakat	0,941	0,915

Sumber: Lampiran

Tabel 5.4 Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Konstruk	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kinerja Ekonomi	0,544
Kesejahteraan Masyarakat	0,941

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa konstruk kinerja ekonomi memiliki nilai AVE diatas 0,50 sehingga dikatakan baik.

### 5.3.2 Uji *Inner Model*

Uji inner model merupakan pengujian antar variabel dengan melihat nilai *R-Square* dan  $Q^2$  atau *Stone Geiser Q Square test*. Konstruk dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengetahui indikasi model struktural yang menyatakan bahwa model "baik", "moderat" dan "lemah". Hasil  $R^2$  sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa model "baik", "moderat", dan "lemah" (Ghozali, 2011). Konsekuensi nilai rendah bahkan nol akan memberikan indikasi model struktural lemah didalam model penelitian. Model penelitian yang baik memiliki nilai *R-Square* yang besar pada variabel konstraknya. Hasil olahan  $R^2$  pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.29.

Tabel 5.5 Nilai *R Square* untuk Variabel Konstruk Endogen

Variabel	R-square	Keterangan
Kinerja Ekonomi ( $Y_1$ )	0,320	Lemah

Kesejahteraan Masyarakat (Y <sub>3</sub> )	0,820	Kuat
--	-------	------

Sumber: Lampiran

Tabel 5.5 menunjukkan nilai R-square variabilitas kontruk kinerja ekonomi dijelaskan oleh kontruk kinerja ekonomi sebesar 32,2 persen dan sisanya sebesar 67,8 persen dijelaskan oleh faktor lain selain ketiganya. Kontruk kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh kontruk kinerja ekonomi

Berdasarkan R<sup>2</sup> pada Tabel 5.5 maka dapat dihitung Q<sup>2</sup> atau Stone Geiser Q-square test yaitu :

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - \{(1 - 0,322)(1 - 0,820)\} \\
 &= 1 - \{(0,678) (0,18)\} \\
 &= 1 - 0,1224 \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan Q<sup>2</sup> sebesar 0,89 sehingga dapat dikatakan memiliki *prediktif prevelance* yang baik sehingga model yang dihasilkan layak digunakan untuk memprediksi, angka 0,89 dapat diartikan bahwa variasi kesejahteraan masyarakat sebesar 89 persen mampu dijelaskan oleh variasi kinerja ekonomi Sedangkan sisanya sebesar 11 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.6 *Path Coefisient* Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antar variabel	Original sampel	Standard Deviation	T statistik	P values
Kinerja Ekonomi → Kesejahteraan Masyarakat	0,642	0,055	11,634	0,000

Sumber: Lampiran

## **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Dengan demikian, kinerja ekonomi yang diukur menggunakan indikator penyerapan tenaga kerja, pendapatan perkapita, investasi swasta, dan PDRB per-kapita mampu menjelaskan dengan baik secara langsung perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yaitu kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat signifikannya kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat lebih disebabkan oleh faktor inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **5. KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Studi ini secara umum bertujuan mengetahui pengaruh kinerja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis kuantitatif dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan Kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan faktor inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **5.2 Saran**



Berdasarkan hasil penelitian ini, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknyapemerintah mendorong kinerja ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan merangkul semua golongan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan serta penguatan lembaga - lembaga sosial masyarakat.
2. Dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan perhatian pada peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per-kapita.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*, UPP YPKN, Yogyakarta
- Afonso, António, Ludger Schuknecht dan Vito Tanzi. 2005. *Public Sector Efficiency: An International Comparison*. Public Choice (2005) 123: 321–347.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Barry W. Poulson, & Jules Gordon Kaplan. (2008). *State Income Taxes and Economic Growth*. Cato Journal, Vol. 28.
- Devarajan, dkk 1996. *The Composition of Public Expenditure and Economic Growth*. Journal of Monetary Economics 37 (1996) 313-344.
- Farrell, M.J.1957. *The Measurement of Productive Efficiency*. Journal of The Royal Statistical Society, Series A (General) Vol. 120, No. 3 (1957), 253-290.
- Ferdinand. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: FE UNDIP.
- Grigoli, Francesco. 2012. *Public Expenditure in the Slovak Republic: Composition and Technical Efficiency*. IMF Working Paper WP/12/173.
- Hauer, David dan Annette Kyobe. 2010. *Determinants of Government Efficiency*. World Development Vol. 38, No. 11, pp. 1527–1542.
- Jhingan, ML. (2008). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Strategi, Perencanaan dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). *A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions*. American Economic Review, XXXII (4):942-63.

- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi (Liza Fitria & Nurmawan Imam, Penerjemah)*, Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmayanti, Yogi dan Theara Horn. 2011. *Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries*. Global Economy and Finance Journal Vol.4.No.2. September 2011. Pp.46-59.
- Sirojuzilam dan Hahalli, Kasyful. 2011. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*. USU Press. Medan.
- Sjafrizal. (2000). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI.
- Todaro, Michael P., & Smith Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Yelvi Andri, Penerjemah)*, Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga. United Nations Development Programme (UNDP). (2008). *Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*.
- Todaro, Michael P. And Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.